



Pusat Analisis Keperlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TERDEPAN

**Mohammad Teja**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[teja@dpr.go.id](mailto:teja@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kerentanan, kerawanan, dan kemiskinan, bahkan eksklusi sosial sering menjadi persoalan pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia. Persoalan masyarakat pesisir, terutama yang berada di daerah 3T sudah dianggap sebagai sebuah ekosistem yang memiliki kerentanan geografis, geologis, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, peningkatan ekonomi dan membentuk kemandirian masyarakat pesisir di daerah 3T dinilai juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Indonesia setidaknya memiliki 62 kabupaten dan 11 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, termasuk di dalamnya daerah 3T yang bersinggungan dengan wilayah Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Hadirnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, pada saat memberikan bantuan sosial di Kepulauan Mapia Kabupaten Supiori Papua, Kabupaten Biak Numfor Papua, dan Kabupaten Jayapura Papua menjadi salah satu bukti bahwa negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.

Hadirnya negara untuk melindungi, mengunjungi, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di daerah 3T merupakan implementasi dari Nawacita yang diwujudkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam membangun Indonesia dari pinggiran desa. Tidak hanya itu, pemberian bantuan di daerah 3T juga ditujukan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperteguh semangat kebhinekaan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Kemensos RI di Papua dilakukan untuk menyalurkan bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mandiri memenuhi kebutuhan dasar dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Pemberian bantuan dengan pemberdayaan akan menciptakan kebiasaan masyarakat mandiri dan berkelanjutan.

Adapun bantuan sosial yang diberikan di antaranya meliputi pangan, bibit tanaman, unggas petelur, perlengkapan sekolah, obat dan alat Kesehatan, keperluan perbaikan fasilitas umum, pendampingan, dan sebagainya. Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut disambut baik oleh warga setempat, mengingat selama ini warga mengalami keterbatasan. Kepulauan Mapia, misalnya. Mapia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan serta perkebunan kelapa yang berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada warga setempat. Namun sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh warga dikarenakan keterbatasan sarana prasarana, salah satunya angkutan kapal laut. Ketersediaan transportasi laut dinilai dapat menunjang warga untuk memasarkan hasil perikanan, kopra, dan sebagainya untuk dijual ke wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menambah frekuensi transportasi laut dari dan tujuan Pulau Mapia. Dukungan infrastruktur transportasi laut dibutuhkan untuk mendorong peningkatan ekonomi warga. Selain bantuan sarana prasarana, Kemensos RI juga melakukan pendampingan kepada warga setempat. Pendampingan dinilai sangat penting agar warga mengetahui dan dapat mengelola potensi alam yang ada.

Pemberdayaan masyarakat daerah 3T membutuhkan peran dan kerja sama banyak pihak, salah satunya pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus mulai mengambil kesempatan dalam setiap program bantuan sosial berbasis pemberdayaan dari hulu sampai hilir, tak terkecuali daerah 3T yang memiliki *carrying capacity* yang terbatas. Lebih lanjut, keterlibatan semua kementerian terkait juga dibutuhkan guna mewujudkan program pemberdayaan masyarakat 3T berhasil dan berkelanjutan. Pentingnya dukungan dan kerja sama antarkementerian serta anggaran yang berpihak pada daerah 3T dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pemasaran hasil produk pemberdayaan masyarakat

## Atensi DPR

Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan yang dilakukan Kemensos RI perlu dukungan DPR RI khususnya Komisi VIII untuk mengkoordinasikan semua kementerian yang terlibat dalam membangun kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya daerah 3T. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mendorong Kemensos RI untuk melakukan pendekatan kepada semua Kementerian, terutama yang memiliki komoditas tertentu untuk segera membantu dan ikut dalam program bantuan sosial berbasis pemberdayaan.
2. Meminta kepada setiap kementerian yang memiliki pendamping/penyuluh untuk mengelola potensi lokal dan memiliki aksesibilitas pemasaran yang luas dalam melakukan pendampingan.
3. Mengusulkan penambahan anggaran tidak hanya di Kemensos RI namun di setiap kementerian terkait, guna mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 3T dan segala kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah 3T.
4. Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya program dan percepatan pembangunan infrastruktur hingga terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah 3T.

## Sumber

Kompas, 14 September 2023;

kompas.id, 13 September 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023